

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan Adri Desafuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan kesembilan. Jakarta: PTIK, 2019.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- . *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, cetakan keempat. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Pustaka, 2006.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus, M. R. Sri Soemantri Martosoewignyo, Syachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, J. B. J. M. ten Berge, P. J. J. van Buuren, dan F. A. M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan kedelapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- HS, Salim. *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, cetakan pertama. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- . *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Indrajaya, Rudi, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas, dan Rizkika Arkan Putera Indrajaya. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, cetakan kesatu. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW Edisi Revisi*, cetakan pertama. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>. Diakses 13 Februari 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan kesembilan. Bandung, Citra Aditya Bakti: 2012.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cetakan keempat. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Nugraha, Safri, Anna Erliyana, Sri Mamudji, Tri Hayati, Harsanto Nursadi, Eka Sri Sunarti, dan Dian Puji N. Simatupang. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: Center for Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Prajitno, A. Andi. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Edisi Revisi*. Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2016.
- Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- . *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, cetakan pertama. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, cetakan pertama. Bandung: Mizan Pustaka: 2014.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Ramdani, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- Santoso, Lukman dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, cetakan pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Satriawan, M. Iwan dan Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*, cetakan pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009.
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan keenam belas. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Suherman, Ade Maman dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Susantijo, Susi. *Introduction to Indonesian Civil Law*. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009.
- Wiratno. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.

B. Jurnal Ilmiah

- Budianto, Agus. "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science." *International Journal of Criminology and Sociology* vol. 9 (2020): 1339–1346. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>. Diakses 13 Februari 2022.

- Canggayuda, Joel, Hana Sri Puji Rahayu dan Anindya Haswaningrum. “Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Privat Law* vol. 7 (Januari-Juni 2015): hal. 137–138. <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/637>. Diakses 15 Juni 2022.
- Dhiyo, Anak Agung Devyn Amanda dan I Wayan Wiryawan. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris.” *Acta Comitatus* vol. 6, no. 1 (April 2021): hal. 152–161. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p13>. Diakses 19 April 2022.
- Harahap, Nurhotia. “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuny* vol. 4, no. 1 (2018): hal. 116–129. <http://194.31.53.129/index.php/elqanuniy/article/view/1831>. Diakses 20 April 2022.
- Ishak. “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* vol. 19, no. 3 (Agustus 2017): hal. 571–590. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6875>. Diakses 17 April 2022.
- Ontolay, Angly Branco. “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Privatum* vol. 7, no. 3 (Maret 2019): hal. 111–118. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25918/25560>. Diakses 19 April 2022.
- Prasetyo, Ririk Eko. M. Khoidin, dan Ermanto Fahamsyah. “Makna Pemberian Penyuluhan Hukum oleh Notaris Pembuat Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Lex Humana Jurnal Hukum dan Humaniora* vol. 1, no. 1 (Oktober 2016): hal. 105–116. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1376>. Diakses 15 Juni 2022.
- Pratiwi, Yulita Dwi. “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas.” *Jurnal Suara Hukum* vol. 1, no. 1 (2019): hal. 61–90. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>. Diakses 10 April 2022.
- Sanawiah dan Muhammad Zainul. “Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Hadrat Madaniyah* vol. 5, no. 1 (June 2018): hal. 1–12. <http://journal.umpalngkaraya.ac.id/index.php/jhm/article/view/157>. Diakses 25 Mei 2022.
- Sanjaya, Umar Haris. “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris.” *Jurnal Yuridis* vol. 5, no. 1 (Juni 2018): hal. 67–97. <http://dx.doi.org/10.35586/v5i1.317>. Diakses 19 April 2022.

Wahyudi, Firman. "Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak." *MIMBAR HUKUM* vol. 31, no. 3 (Oktober 2019): hal. 368–383. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/44398>. Diakses 10 April 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Inlandsch Reglement.

Rechtreglement voor de Buitengewesten.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

D. Perjanjian Internasional

Convention on the Rights of the Child.

E. Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Tjs.

Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Jmr.

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 443/Pdt.P/2020/PA.JS.

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 918/Pdt.P/2021/PA.JS.

F. Media Internet

Black's Law Dictionary. "Guardian." Diakses 23 Februari 2022. <https://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf>.

KBBI Daring. "Wali." Diakses 8 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wali>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus. "Standar Pelayanan Publik." Diakses 14 Juni 2022. <https://pn-tangerang.go.id/link/2019081200223215817918645d50b148d6941.html>.

Unicef. "Four principles of the Convention on the Rights of the Child." Last modified 24 June 2019. Diakses 10 Desember 2021. <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>.